



Badan Kerja Sama
Antar-Parlemen DPR RI



Inter-Parliamentary Union
For democracy. For everyone.

LAPORAN KEGIATAN

BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN

Lokakarya Pengembangan Kapasitas Advokasi dan Komunikasi untuk Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Politik

Senin, 2 Oktober 2023
JHL Solitaire, Gading Serpong, Tangerang





**LAPORAN
DELEGASI DPR RI**

**LOKAKARYA PENGEMBANGAN KAPASITAS
ADVOKASI DAN KOMUNIKASI UNTUK
MENINGKATKAN PARTISIPASI PEREMPUAN
DALAM POLITIK**

**Senin, 2 Oktober 2023
JHL Solitaire, Gading Serpong, Tangerang**



**LAPORAN KEGIATAN BKSAP DPR RI
WORKSHOP PENGEMBANGAN KAPASITAS MENGENAI ADVOKASI DAN
KOMUNIKASI UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI PEREMPUAN
DALAM POLITIK**

**TANGERANG, BANTEN
2 OKTOBER 2023**

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) adalah anggota IPU. Saat ini, jumlah perempuan di DPR RI mencapai 21,57 persen dan merupakan angka tertinggi yang pernah dicapai. Beberapa posisi kepemimpinan DPR dipegang oleh perempuan, termasuk Ketua dan Ketua Komite Luar Negeri dan Pertahanan. DPR memiliki komite yang bertugas menangani urusan pemberdayaan perempuan.

Pada tahun 2001, DPR RI membentuk Kaukus Perempuan Anggota Parlemen Republik Indonesia (KPPRI). Kaukus parlemen lintas partai khusus perempuan yang bertujuan untuk mendorong partisipasi perempuan dalam kehidupan publik dan melalui rancangan undang-undang yang penting bagi perempuan.

Pada bulan November 2022, Kaukus Parlemen Perempuan menandatangani deklarasi untuk “mengutuk segala bentuk kekerasan berbasis gender yang menghalangi perempuan memenuhi persamaan hak mereka” untuk mendesak semua kelompok politik mendukung perempuan agar berpartisipasi secara aman dalam politik.

Pada tahun 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan IPU telah sepakat untuk meningkatkan kolaborasi mereka melalui proyek IPU multi-tahun baru yang bertujuan untuk memperkuat partisipasi politik perempuan dan mengkonsolidasikan kapasitas parlemen untuk bertindak demi kesetaraan gender.



Melalui proyek ini, IPU dan DPR bertujuan untuk membantu anggota parlemen perempuan dalam membangun kapasitas mereka dalam mendukung peran mereka sebagai legislator terpilih.

B. DASAR KEGIATAN

Delegasi BKSAP DPR RI menghadiri Workshop Pengembangan Kapasitas Mengenai Advokasi dan Komunikasi untuk Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Politik di Tangerang berdasarkan Surat Tugas Nomor: 69/KU.02.02/09/2023, tanggal 29 September 2023.

C. TUJUAN KEGIATAN

1. Memperkuat keterampilan komunikasi mereka dengan media dan masyarakat khususnya mengenai isu-isu kesetaraan gender dan partisipasi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam politik dan parlemen
2. Meningkatkan kesadaran mengenai isu kesetaraan gender baik di kalangan instansi pemerintah maupun masyarakat umum
3. Menentukan strategi untuk meyakinkan dan memobilisasi kelompok sasaran advokasi yang berbeda: media, aktor lokal, dan masyarakat pedesaan
4. Menentukan pesan-pesan utama mengenai kesetaraan gender dalam politik yang disesuaikan dengan khalayak sasaran, yang dapat digunakan

oleh anggota parlemen dalam melakukan advokasi dengan media, aktor lokal, dan masyarakat pedesaan

5. Mempraktikkan skenario tanya jawab mengenai tema-tema yang berkaitan dengan kesetaraan dan partisipasi seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam politik dan parlemen
6. Mendukung anggota parlemen dalam mempersiapkan konferensi pers mengenai pentingnya partisipasi perempuan di parlemen dan politik

D. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Narasumber

- a. **Dr. Fadli Zon, S.S., M.Sc** Ketua Badan Kerja Sama antar Parlemen (BKSAP) DPR RI
- b. **Mr. Olivier Richard** Seasoned consultant and expert in both soft skills building and communications, Dynargie, Switzerland
- c. **Presentation by Hon. Meera Al Suwaidi** - Member of Parliament at Federal National Council – Dubai-UAE, following Q&A

2. Waktu Pelaksanaan

Hari/ Tanggal : Senin, 2 Oktober 2023

Waktu : Pukul 10.00 – 13.00 WIB

Tempat : JHL Solitaire Gading Serpong Jl. Gading Serpong Boulevard, Gading Serpong, Kec. Klp. Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15810

3. Peserta

No.	Nama Delegasi	Jabatan / Fraksi
1.	Dr. Fadli Zon	Ketua BKSAP DPR RI/ F. Gerindra
2.	Vanda Sarundajang	Anggota BKSAP DPR RI / F.PDIP
3.	Ina Ammania	Anggota BKSAP DPR RI / F.PDIP
4.	Adriana C. Dondokambey	Anggota BKSAP DPR RI / F.PDIP
5.	Adde Rosi Khoerunnisa	Anggota BKSAP / F. Golkar

6.	Hilmmatul Aliyah	Anggota BKSAP / F. Gerindra
7.	Ratih Megasari Singkaru	Anggota BKSAP / F. NasDem
8.	Linda Megawati	Anggota BKSAP / F. Demokrat
9.	Dewi Coryati	Anggota BKSAP / F. PAN
10.	Ema Umiyyatul Chushnah	Anggota BKSAP / F.PPP

II. ISI LAPORAN

A. PELAKSANAAN TUGAS

Materi yang dijadikan referensi bagi Ketua BKSAP DPR RI diolah oleh Tenaga Ahli dan Sekretariat KSI BKSAP berupa Sambutan, *Points of Interventions* dan pertanyaan - pertanyaan dalam memandu diskusi lokakarya.

B. AGENDA

LOKAKARYA/WORKSHOP PENGEMBANGAN KAPASITAS MENGENAI ADVOKASI DAN KOMUNIKASI UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM POLITIK

10.00 - 10.15	Agenda Pembukaan <i>(Penerjemahan simultan dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia disediakan)</i> Sambutan pembukaan oleh: <ul style="list-style-type: none">• Dr. Fadli Zon, (Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen)
10.15 - 11.30	Sesi Berbagi Pengalaman Pembicara: <ul style="list-style-type: none">• Hon. Ms. Meera Al Al Suwaidi (Anggota Parlemen Perempuan dari Uni Emirat Arab)
11.30 – 11.45	Coffee Break
11.45 – 12.50	Sesi Pengembangan Kapasitas Pembicara: <ul style="list-style-type: none">• Mr. Olivier Christian Bernard Richard (Consultant and expert in soft skills building and communications at Dynargie)
12.50 – 13.00	Pidato Penutup Ms. Graça Maria Lopes de Carvalho Sanches (Project officer consultant at the IPU Gender Partnership Programme)
13.00-Selesai	Makan Siang

C. PELAKSANAAN ACARA

1. PEMBUKAAN

Pada sesi pembukaan Dr. Fadli Zon, S.S., M.Sc Ketua Badan Kerja Sama antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menyampaikan bahwa DPR RI terus berkomitmen dalam mendorong partisipasi perempuan dalam politik. Saat ini, DPR RI terdiri dari 124 anggota parlemen perempuan, yang mewakili sekitar 21,57% dari total 575 kursi. Meskipun masih belum mencapai target afirmatif sebesar 30%, namun angka tersebut merupakan peningkatan yang signifikan dibandingkan 18% pada tahun 2019. DPR RI merupakan satu-satunya parlemen di Asia Tenggara yang memiliki Ketua perempuan. Beberapa anggota penting komisi parlemen kita juga dipimpin oleh perempuan.



Komitmen kami juga terlihat dalam kerangka hukum kami, termasuk tindakan afirmatif (UU No. 2 tahun 2018), yang mewajibkan partai politik untuk memastikan minimal 30% perempuan dalam daftar kandidat mereka. Rencana Aksi Nasional Kesetaraan Gender 2020-2024 juga menjadi peta jalan kita untuk memajukan kesetaraan gender di berbagai sektor, termasuk politik.

Pada bulan April 2022, kita mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tahap pembahasan akhir yang inklusif terhadap undang-undang ini memasukkan masukan dari kelompok perempuan dan masyarakat sipil,

seperti yang dikemukakan oleh gerakan yang dipimpin perempuan secara nasional. Hal ini menunjukkan pentingnya kepemimpinan perempuan dalam proses pembuatan undang-undang.

Pada Sidang Umum ke-44 terakhir di bulan Agustus, Anggota Parlemen Perempuan AIPA (WAIPA) berhasil mengadopsi Resolusi Peningkatan Ketahanan ASEAN melalui Kepemimpinan Perempuan dan Parlemen Responsif Gender, yang diperjuangkan oleh Indonesia. Hal ini menandakan kepemimpinan kita untuk memajukan komitmen kolektif anggota parlemen ASEAN melalui kepemimpinan perempuan dan praktik parlemen yang responsif gender.

Pada tahun 2022, kami menyetujui proyek multi-tahun dengan IPU, yang menandakan dedikasi kami bersama untuk meningkatkan kapasitas parlemen dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Proyek ini bertujuan untuk memberdayakan dan mendukung anggota parlemen perempuan dengan keterampilan yang diperlukan agar dapat unggul dalam peran mereka. Khususnya menjelang pemilu legislatif tahun 2024 mendatang, kolaborasi DPR RI dengan IPU akan fokus pada peningkatan kapasitas anggota parlemen perempuan dan laki-laki, sehingga memungkinkan mereka untuk secara efektif menyampaikan pentingnya partisipasi perempuan dalam politik dan parlemen.



DPR RI akan mendefinisikan strategi dan pesan-pesan utama untuk mempromosikan dan memobilisasi berbagai kelompok sasaran advokasi

dan konstituen, termasuk pemangku kepentingan lokal dan masyarakat pedesaan. DPR RI akan menyelidiki permasalahan yang menantang dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dalam politik selama pemilu, dimana pengalaman Anda dapat memberikan konteks dan solusi yang berharga.

DPR RI juga menekankan pentingnya tindakan kolaboratif antara anggota parlemen laki-laki dan perempuan dalam perjalanan menuju kesetaraan gender. Meskipun fokus utama kami saat ini adalah peningkatan kapasitas, DPR RI tidak bisa mengesampingkan pentingnya keterlibatan aktif anggota parlemen laki-laki dalam diskusi ini dan memobilisasi dukungan sebagai sekutu dan pendukung kesetaraan gender.

2. SESI BERBAGI PENGALAMAN

Pada sesi berbagi pengalaman Hon. Ms. Meera Al Al Suwaidi, Anggota Parlemen Perempuan dari Uni Emirat Arab (UEA) menyampaikan pengalaman UEA dalam melakukan berbagai reformasi kesetaraan gender. Tahun 2006 merupakan tonggak sejarah bagi upaya kesetaraan perempuan dan laki-laki di UEA. UEA bersama negara-negara Arab lainnya menarik reservasi terhadap UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW).



Tahun 2006 juga periode ketika UEA telah melakukan reformasi pada Konstitusi UEA tahun 1971 dengan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan setiap umat manusia baik laki-laki maupun perempuan. Pada tahun itu

adalah awal mula perempuan mendapatkan hak untuk memilih dan berpartisipasi dalam proses politik termasuk menjadi kandidat-kandidat politik.

Pemerintah dan parlemen UEA telah melakukan berbagai program untuk memberikan insentif bagi partisipasi perempuan dalam politik dan memperjuangkan jabatan serta posisi tinggi dalam pemerintahan, parlemen, swasta dan institusi-institusi lainnya. Program pemberdayaan perempuan, pemuda dan advokasi untuk memastikan inklusi dalam proses politik terus didorong dan difasilitasi oleh pemerintah dan parlemen. Salah satu regulasi pemerintah juga adalah mewajibkan perusahaan untuk memiliki anggota perempuan dalam dewan direksi. Saat ini perempuan di UEA telah menjabat posisi-posisi tinggi seperti Anggota Parlemen, Menteri, Duta Besar, Pimpinan Perusahaan dan perempuan muda UAE juga banyak berperan aktif dalam proses reformasi ini.

Hon. Ms. Meera Al Al Suwaidi, sebagai anggota perempuan muda parlemen menekankan pentingnya meningkatkan proses partisipasi publik dan memupuk aspirasi masyarakat untuk mendorong reformasi gender. Perempuan juga perlu untuk saling mendukung menjadi lebih asertif dalam bernegosiasi. Melibatkan masyarakat sipil, melakukan penjangkauan masyarakat dan juga bermitra baik dengan media menjadi kunci dari advokasi kesetaraan gender dalam politik. Parlemen juga harus memastikan pendekatan inklusif bagi perempuan dalam politik. Memastikan dukungan dari pimpinan, tokoh masyarakat dan anggota parlemen laki-laki sangat signifikan dalam mendorong perubahan.

Upaya reformasi kesetaraan gender perlu melibatkan banyak rangkaian perubahan baik dari segi regulasi, struktural dan juga sosial. Penting bagi parlemen untuk memetakan dimana letak perubahan yang perlu dilakukan dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Dalam upaya *legislative scrutiny* contohnya, parlemen perlu melakukan berbagai upaya pengawasan agar memastikan perubahan itu bisa sampai pada level lokal dan juga memastikan bahwa regulasi-regulasi lama yang perlu diperbaharui untuk mendukung perubahan-perubahan tersebut.

3. SESI DISKUSI

a. VANDA SARUNDAJANG: Perempuan dalam Politik Indonesia: Keadaan Saat Ini dan Jalan ke Depan

Saat ini, jumlah anggota parlemen perempuan di DPR RI berjumlah 124 orang, atau sekitar 21,57% dari total 575 kursi. Meskipun pangsa tersebut masih di bawah kuota afirmatif sebesar 30%, namun pangsa tersebut telah meningkat sebesar 3 poin persentase sejak dekade

sebelumnya (18% pada tahun 2010, 21% pada tahun 2022). Beberapa Komisi di parlemen kita dipimpin (Diketuai dan/atau Wakil Diketuai) oleh perempuan, seperti Komisi 1 Bidang Luar Negeri dan Pertahanan; Komisi 9 Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan; Komisi 8 yang menangani Masalah Keagamaan, Sosial dan Pemberdayaan Perempuan; serta Komisi 10 Bidang Pendidikan dan Olahraga.



Anggota BKSAP DPR RI Vanda Sarundajang saat sesi diskusi workshop on advocacy on communication to promote women's participation in politics. (Dok BKSAP)

Indonesia telah menerapkan berbagai langkah untuk mendukung partisipasi politik perempuan, seperti tindakan afirmatif (UU No. 2/2018 tentang Partai Politik), yang mewajibkan partai politik untuk memastikan keterwakilan minimal 30% perempuan dalam daftar kandidat mereka. Kita memiliki Rencana Aksi Nasional Kesetaraan Gender 2020-2024, yang merupakan peta jalan untuk meningkatkan kesetaraan gender di berbagai sektor, termasuk politik

DPR juga terus berupaya meningkatkan pengarusutamaan gender dalam proses parlemen, kebijakan responsif gender, dan penilaian risiko gender pada produk legislatif. Penilaian terhadap penyusunan undang-undang tersebut akan membantu mengidentifikasi kebutuhan kebijakan dan bidang tindakan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan gender dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif.

Contoh-contoh terbaru yang menyoroti kemajuan kami dalam hal partisipasi perempuan yang berpengaruh dalam proses pembuatan undang-undang adalah: Pertama, pemberlakuan UU Tindak Pidana

Kekerasan Seksual (No. 12 Tahun 2022) setelah melalui pembahasan selama enam tahun. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan pertama kali memprakarsai rancangan tersebut pada tahun 2014, dan advokasi ekstensif dari aktivis hak-hak perempuan dan masyarakat sipil berhasil menyetujui rancangan tersebut. Hal ini melibatkan pertemuan, diskusi publik, kampanye media sosial, dan gerakan publik yang dipimpin perempuan secara nasional. Fase musyawarah akhir yang inklusif memasukkan masukan dari kelompok perempuan dan penyedia layanan, yang menunjukkan kepemimpinan perempuan dalam proses tersebut. Kedua, RUU Energi Terbarukan yang memberikan contoh inklusi perempuan dalam proses penyusunannya; sebuah langkah penting, terutama bagi perempuan di daerah pedesaan yang sangat bergantung pada energi yang terjangkau dan mudah diakses untuk mengelola rumah tangga mereka.

Meskipun demikian, penting untuk menyadari bahwa mewujudkan parlemen yang responsif gender tidak hanya sekedar keterwakilan secara numerik. Hal ini juga memerlukan penciptaan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi anggota parlemen perempuan untuk terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Parlemen harus memastikan bahwa anggota parlemen perempuan tidak hanya hadir namun juga dapat mempengaruhi hasil kebijakan dan membentuk agenda legislatif.

b. INA AMMANIA: Aksi kolaboratif antara anggota parlemen laki-laki dan perempuan dalam memajukan partisipasi politik Perempuan



Peran anggota parlemen laki-laki merupakan kunci dalam dalam mengupayakan keterwakilan yang lebih seimbang di parlemen dan proses politik. Meskipun fokus kami saat ini adalah meningkatkan kapasitas parlemen dalam advokasi dan komunikasi untuk mendorong partisipasi perempuan dalam politik, penting untuk mengakui keterlibatan aktif laki-laki dalam upaya ini, dan dukungan terhadap laki-laki sebagai pejuang kesetaraan gender yang efektif.

Untuk menciptakan perubahan yang berarti, laki-laki dapat menjadi katalisator kesetaraan gender dengan secara aktif mengadvokasi hak-hak dan keterwakilan perempuan di parlemen. Meskipun terdapat kemajuan dalam partisipasi politik perempuan, masih terlihat jelas bahwa laki-laki memegang mayoritas kursi parlemen – tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Ketidakseimbangan ini tidak hanya menghambat realisasi kesetaraan gender secara penuh namun juga membatasi beragam perspektif dan pendekatan dalam proses pengambilan keputusan.

Peran laki-laki dalam posisi berkuasa dan berpengaruh dalam memajukan kesetaraan perempuan dalam politik. Laki-laki memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan politik dan dapat memainkan peran penting dalam menghilangkan hambatan sistemik dan mendorong kebijakan yang responsif gender.

c. DEWI CORYATI : Resolving Gender Based Violence in Politics



DPR RI telah menjadi pionir dalam mendorong partisipasi perempuan di parlemen melalui kerja kami di Kaukus Perempuan, aktivisme, partisipasi regional dan internasional mengenai topik-topik ini. DPR telah melakukan berbagai kampanye setiap tahun untuk mempromosikan anti-kekerasan bagi perempuan dalam politik dan telah memfasilitasi DPRD untuk membentuk kaukus perempuan mereka sendiri di wilayah tersebut. Saat ini kami telah membantu memfasilitasi di 10 provinsi dan 40 kabupaten untuk tidak hanya membentuk kaukus sendiri tetapi juga melatih dan mendidik partisipasi perempuan dalam politik dan parlemen. Kami juga telah merumuskan peta jalan untuk memastikan 30% keterwakilan perempuan dalam politik.

Namun, para Anggota dan Calon Legislator masih menghadapi banyak persoalan terkait kekerasan dalam politik dan kampanye. Karena sebagian besar kekerasan kini terjadi secara online melalui pencemaran nama baik, penindasan, pelecehan, ancaman, doxing, dan tekanan politik, hal ini menjadi salah satu hambatan terbesar dalam mendorong perempuan agar mau berpartisipasi dalam proses politik.

4. SESI PEMAPARAN

Sesi pemaparan dibawakan oleh Mr. Olivier Richard konsultan Dynargie yang dilibatkan IPU dalam program ini.



Sesi ini bertujuan untuk membangun kapasitas dalam advokasi dan komunikasi kesetaraan gender dalam politik. Pelatihan ini didesain untuk para Anggota Dewan dan nantinya juga induksi Anggota Dewan baru nantinya untuk membangun strategi komunikasi dan *engagement* kepada konstituen dan masyarakat. Paparan ini juga termasuk alat yang bisa dimodifikasi dan diterapkan sesuai dengan konteks dan dinamika politik yang ada di Indonesia. Paparan juga mencakup strategi untuk bermitra dengan media dan membangun jaringan advokasi dalam mendorong inisiatif-inisiatif reformatif kesetaraan gender.

III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

1. Keseluruhan kegiatan Lokakarya berjalan dengan lancar dan diskusi berjalan dengan baik
2. Kehadiran dan peran aktif Anggota BKSAP DPR RI yang hadir pada lokakarya ini sangat penting sebagai upaya penguatan promosi peran perempuan dalam politik dan parlemen.
3. Diskusi setiap sesinya berlangsung dinamis dari masing-masing narasumber dan peserta berbagi pengetahuan dan pengalaman yang telah dilakukan dalam meningkatkan peran perempuan dalam politik dan parlemen.
4. DPR RI akan terus melakukan koordinasi dan kerjasama terkait program terkait isu perempuan dilaksanakan IPU, serta terus aktif dalam kegiatan-kegiatan baik nasional dan internasional untuk memperjuangkan representasi perempuan dalam politik.

B. REKOMENDASI

1. Materi kegiatan Lokakarya sangat penting untuk dijadikan bahan untuk kemudian dipromosikan dan disosialisasikan pada Anggota BKSAP dan Anggota Kaukus Perempuan di DPR RI.
2. Masukan dan hasil diskusi dari kegiatan ini juga turut bisa menjadi referensi untuk pengarusutamaan gender di DPR RI.



IV. PENUTUP

A. ANGGARAN

Kegiatan Delegasi BKSAP DPR RI menghadiri Lokakarya Peningkatan Kapasitas Untuk Advokasi dan Komunikasi Dalam Mempromosikan Partisipasi dalam Politik pada Senin, 2 Oktober 2023 di Tangerang, Banten dilaksanakan dengan mata anggaran 001030.CF.5805.AEC.001.051.E.524111 sebesar Rp259.768.000 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah)

B. LAMPIRAN DAN DOKUMENTASI

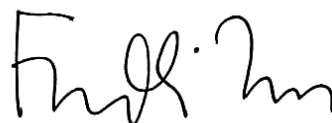
1. TOR dan Bahan (TERLAMPIR)
2. [Dokumentasi foto](#) (Link Dokumentasi)
3. Publikasi media
 - a. Media Siber
 - [Fadli Zon: Peran Perempuan Sangat Dibutuhkan dalam Pengambilan Keputusan](#)
 - b. TVR Parlemen
 - [BKSAP DPR RI : Penguatan Kapasitas Perempuan Di Dunia Politik](#)
 - [BKSAP DPR RI : Pentingnya Partisipasi Parlemen Perempuan](#)

C. KATA PENUTUP

Demikianlah pokok-pokok Laporan Kegiatan BKSAP DPR RI dalam Lokakarya Peningkatan Kapasitas Untuk Advokasi dan Komunikasi Dalam Mempromosikan Partisipasi dalam Politik pada Senin, 2 Oktober 2023 di Tangerang, Banten. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas kegiatan, serta dalam rangka ketertiban kearsipan sebagai bahan referensi bagi kegiatan serupa berikutnya. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Oktober 2023

Ketua BKSAP



DR. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc

A-86



LAMPIRAN



Badan Kerja Sama
Antar-Parlemen DPR RI



Inter-Parliamentary Union
For democracy. For everyone.

TERM OF REFERENCE

Proyek Kesetaraan Gender dalam Politik

Lokakarya Pengembangan Kapasitas Advokasi dan Komunikasi untuk Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Politik

Senin, 2 Oktober 2023

JHL Solitaire, Gading Serpong, Tangerang



Inter-Parliamentary Union
For democracy. For everyone.



DUKUNGAN KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PROYEK KESETARAAN GENDER DALAM POLITIK

Lokakarya pengembangan kapasitas mengenai advokasi dan komunikasi untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik

Kerangka Acuan

Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) adalah anggota IPU. Saat ini, jumlah perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mencapai 21,57% dan ini merupakan angka tertinggi yang pernah diraih. Beberapa posisi kepemimpinan Dewan Perwakilan Rakyat juga dipegang oleh perempuan, termasuk Ketua DPR RI dan ketua Komisi Luar Negeri dan Pertahanan. DPR RI memiliki komisi yang bertugas menangani pemberdayaan perempuan.

Pada tahun 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia membentuk *Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia* (KPPRI). Kaukus parlemen lintas partai khusus Perempuan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam kehidupan publik melalui rancangan undang-undang yang penting bagi perempuan.

Pada bulan November 2022, Kaukus Perempuan Parlemen ini menandatangani sebuah deklarasi untuk “mengutuk segala bentuk kekerasan berbasis gender yang menghalangi perempuan dalam memenuhi persamaan hak mereka” mendesak semua kelompok politik untuk mendukung perempuan agar dapat berpartisipasi secara aman dalam politik¹.

Pada tahun 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan IPU telah sepakat untuk meningkatkan kerja sama dalam sebuah proyek multi-tahun baru yang bertujuan untuk memperkuat partisipasi politik perempuan dan mengkonsolidasikan kapasitas parlemen untuk bertindak demi kesetaraan gender.

Melalui proyek ini, IPU dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memiliki tujuan untuk membantu anggota parlemen perempuan dalam meningkatkan kapasitas mereka dalam mendukung peran mereka sebagai anggota legislatif yang terpilih.

Tujuan

Mengingat pemilu legislatif mendatang yang dijadwalkan pada 14 Februari 2024, IPU dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan bekerja sama untuk meningkatkan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi perempuan dalam politik dan di parlemen. Kedua pihak akan melakukan ini dengan mendukung kapasitas anggota parlemen perempuan dan

¹ Westminster Foundation for Democracy. 2022. *Indonesian parliament calls for urgent action to end violence against women in politics*. Press Release.

laki-laki untuk berkomunikasi secara efektif mengenai pentingnya partisipasi perempuan dalam politik dan di parlemen dengan fokus pada komunikasi dengan media, pengambil keputusan politik dan masyarakat di tingkat nasional dan lokal.

Lokakarya ini akan mencakup kegiatan saling bertukar pengalaman dan saran dengan anggota parlemen dari negara lain.

Tujuan utamanya adalah agar memungkinkan anggota parlemen untuk:

- memperkuat keterampilan komunikasi mereka dengan media dan masyarakat terutama terkait isu-isu kesetaraan gender dan partisipasi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam politik dan di parlemen.
- meningkatkan kesadaran akan isu kesetaraan gender baik di kalangan lembaga pemerintah maupun masyarakat umum
- menentukan strategi untuk meyakinkan dan memobilisasi kelompok sasaran advokasi yang berbeda: media, aktor lokal, dan masyarakat pedesaan
- menentukan pesan utama mengenai kesetaraan gender dalam politik yang disesuaikan dengan khalayak sasaran, yang dapat digunakan anggota parlemen dalam melakukan advokasi mereka dengan media, aktor lokal, dan Masyarakat pedesaan.
- melatih skenario tanya jawab mengenai tema-tema yang terkait dengan kesetaraan dan partisipasi seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam politik dan di parlemen.
- mendukung anggota parlemen dalam menyiapkan konferensi pers mengenai pentingnya partisipasi perempuan dalam politik dan di parlemen

Isi dari lokakarya ini

Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik: strategi dan praktik terbaik di Indonesia dan luar negeri

- **Sesi berbagi pengalaman**
 - Meningkatkan kesadaran pemilih akan pentingnya partisipasi perempuan dalam politik dan di parlemen
 - Memerangi kekerasan terhadap perempuan dalam politik selama pemilu
 - Membuat aliansi dengan partai politik dan pemain kunci lainnya
 - Bekerja sama antara perempuan dan dengan laki-laki
- **Sesi pengembangan kapasitas**

Membangun advokasi dan mengkomunikasikan mengenai pentingnya partisipasi perempuan di parlemen

Advokasi

- Definisi, target, dan tingkatan advokasi
- Teknik dan alat advokasi yang disesuaikan untuk masyarakat umum, pemangku kepentingan setempat, dan masyarakat pedesaan Indonesia
- Identifikasi peluang dan tantangan

Komunikasi

- Pengidentifikasian pesan utama dan penyiapan komunikasi publik
- Pelatihan untuk menyesuaikan pesan kepada khalayak sasaran (media, aktor lokal, dan masyarakat pedesaan)
- Hubungan media dan pemangku kepentingan setempat

- Peta Jalan (*Roadmap*) untuk tindakan

Metodologi

Lokakarya ini akan berorientasi pada hasil, menggabungkan unsur-unsur konsep, teknis, dan strategis. Metodologi ini akan berbasis pada perpaduan informasi, refleksi, pertukaran praktik terbaik dan perencanaan untuk memastikan pencapaian tujuan, dengan mempertimbangkan alokasi waktu dan profil peserta.

Latihan praktis akan memungkinkan peserta untuk mempraktikkan advokasi dan menyesuaikannya dengan profil dan target audiens mereka.

Sesi ini akan dimoderatori oleh **pakar advokasi/komunikasi** dan dua atau lebih anggota parlemen dari negara lain yang berpengalaman di bidang ini.

Tempat dan Waktu

Lokakarya ini akan diselenggarakan pada 2 Oktober 2023 dari pukul 10.00 sampai dengan 13.00. Lokakarya ini akan bertempat di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Peserta

Lokakarya ini akan dihadiri oleh 5 ketua dan 20 anggota perempuan Badan Kerja Sama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Mengingat pemilu legislatif mendatang, dan untuk menjamin netralitas dan ketidakberpihakan IPU, anggota parlemen dari semua kelompok politik yang ada di parlemen, yang merupakan anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen, diundang untuk mengambil bagian di dalam lokakarya ini. Aturan inklusivitas, keramahmatan dan rasa hormat akan diterapkan secara tegas untuk menjadikan lokakarya ini tempat yang aman dan saling menghormati bagi semua peserta.

Evaluasi dan tindak lanjut

Evaluasi akan dilakukan bersama peserta lokakarya. Laporan akan disusun dan dibagikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setelah lokakarya ini. Rekomendasi dan tindakan lanjut yang diidentifikasi oleh peserta selama kegiatan akan dicatat dan sedapat mungkin dimasukkan ke dalam kegiatan di masa yang akan datang.

Peran dan tanggung jawab persiapan

Lokakarya ini akan diselenggarakan bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan IPU.

IPU akan merekrut pakar dan menanggung biaya konsultasi mereka. IPU juga akan menanggung biaya perjalanan para pakar jika lokakarya akan diselenggarakan secara langsung².

Tim pakar tersebut akan mencakup pakar independent, tingkat regional atau internasional yang memiliki pengalaman parlemen dan yang memiliki pengalaman advokasi dan

² According to IPU's rules, MPs and parliamentary and/or governmental officials and staff are not remunerated by the IPU for their participation in or their facilitation of workshops and any other activities.

komunikasi, serta anggota parlemen perempuan dan laki-laki atau mantan anggota parlemen dari negara lain untuk memfasilitasi pertukaran pengalaman di antara para peserta.

Para pakar tersebut akan memfasilitasi sesi lokakarya yang berbeda, memberikan masukan dan saran, serta mendukung pengembangan kapasitas advokasi dan komunikasi untuk meningkatkan partisipasi perempuan di parlemen dan politik.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan menyediakan dan menanggung biaya-biaya yang berkaitan dengan tempat acara, akomodasi, makanan dan minuman, dukungan logistik, perlengkapan tempat acara, termasuk persiapan fasilitas, transportasi lokal, dan staf sekretariat, dll.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan menjami undangan kepada peserta didistribusikan sebagai mana mestinya. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan menyediakan nama-nama pimpinan setiap sesi sebagai mana diuraikan dalam agenda di bawah ini.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan menunjuk penanggung jawab untuk mempersiapkan acara ini bekerja sama dengan IPU. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan menunjuk *Rapporteur* untuk lokakarya ini.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan mengirimkan daftar nama peserta sebelum acara kepada IPU, serta daftar kehadiran selama dua hari yang ditandatangani peserta, dan kuesioner evaluasi yang diisi oleh peserta setelah lokakarya ini.

Output yang diharapkan

- Modul pelatihan komunikasi dan advokasi mengenai pentingnya partisipasi perempuan dalam politik akan disusun dan disampaikan.
- Dokumen hasil dengan pesan-pesan utama dan sebuah peta jalan (*roadmap*) tindakan.



Inter-Parliamentary Union
For democracy. For everyone.

IPI PROJECT ON GENDER EQUALITY IN POLITICS



CAPACITY BUILDING WORKSHOP ON ADVOCACY AND COMMUNICATION TO PROMOTE WOMEN'S PARTICIPATION IN POLITICS Tangerang, 02 October 2023

AGENDA

TIME	CONTENT AND ACTIVITIES	DETAILS
10.00-10.10	Opening session <ul style="list-style-type: none"> Welcoming remarks 	Dr. Fadli Zon Chair of the Committee for Inter-Parliamentary Cooperation
10.10-10.15	Group Photo	
10.15-13.00	CAPACITY-BUILDING SESSION	
10.15-10.20	Introduction	Trainer: Mr. Olivier RICHARD Seasoned consultant and expert in both soft skills building and communications, Dynargie, Switzerland
10.20-10.35	Building advocacy and communication: framework and definitions <ul style="list-style-type: none"> Advocacy and communication: what is it? What it is not? How to get it the right way? Assertiveness: how does it work? Charisma: a skill or a talent? 	
10.35-10.50	Practicing Analysis of a video from the following perspectives: <ul style="list-style-type: none"> Advocacy = expressing ideas in a convincing way Communication = being listened to, being understood Assertiveness = Taking the lead in the conversation 	
10.50-11.30	Presentation? Effective communication techniques and best practices to generate impact and increase our influence: <ul style="list-style-type: none"> Communication: a dynamic and structured process Factors impacting communication's ability Understanding audience(s) Messaging and story-telling models Adapting to audience(s) reaction 	

11.30-11.45	Sharing strategies and good practices: <ul style="list-style-type: none"> • Building alliances with male political and opinion leaders • Working together among women and with men • Raising voters' awareness on the importance of women's participation in politics and parliament 	Presentation by Hon. Meera Al Suwaidi - Member of Parliament at Federal National Council – Dubai-UAE, following Q&A
11.45-12.20	Practicing communication techniques in breakout groups Crafting communication messages	
12.20-12.40	Presentation? Good practices in media and stakeholders' relations: <ul style="list-style-type: none"> • The media revolution • Knowing media / stakeholder channels and anticipating their reactions • Building solid messages • Driving the conversation • Managing stakeholders • The 10 Golden Rules 	
12.40-13.00	Practicing / Q&A: Challenges in communicating to media / stakeholders	



Produced by:

COMMITTEE FOR INTER-PARLIAMENTARY COOPERATION
INDONESIAN HOUSE OF REPRESENTATIVES
(BKSAP DPR RI)

Email: biro_ksap@dpr.go.id

Phone: (62-21) 5715813

ksap.dpr.go.id



@bksapdpr



@bksapdpr



bksapdpr



bksapdpr